

**PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF MENURUT
PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Disusun Oleh :

**JUMRAWATI
10821004522**

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2012

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF MENURUT PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH”. Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah atau yang populer dengan sebutan Abu Hanifah seorang ulama besar yang berasal dari Kufah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H/ 696 M dan wafat pada tahun 150 H/ 767 M. Abu Hanifah adalah seorang ulama yang mendahulukan menggunakan ro'yu dalam memecahkan sebuah masalah. Abu Hanifah semasa hidupnya tidak sempat menulis buku, namun Abu Hanifah memiliki banyak murid dan memiliki banyak pengikut. Banyak buku-bukunya yaitu buku *al-Kafy* yang dikarang oleh al-Hakim Asy-Syahid, yang disyarahkan oleh as-Sarkhasi yang berjumlah 30 jilid yang dinamakan dengan *al-Mabsuth*.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah, pertama, bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf, kedua, bagaimana Istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf, ketiga, analisa terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf, untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah serta Analisa terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf.

Penelitian ini termasuk penelitian jenis kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data pada penelitian ini dikategorikan kepada data skunder yaitu data pokok dan data pendukung. Data adalah karya Hanafiyah yang ditulis oleh Syamsuddin as-Sarkhasi yaitu *al-Mabsuth*, sedangkan data pendukung adalah data yang didapat dari artikel-artikel serta buku-buku yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian. selanjutnya data tertier atau bahan penunjang, yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

Maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode sebagai berikut: deduktif yaitu pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa, dan diperoleh kesimpulan secara khusus. induktif yaitu memaparkan

data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum. deskriptif Analitik yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.

Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Abu Hanifah mengatakan wakaf merupakan salah satu bentuk kedermawanan yang tidak mempunyai konsekuensi pasti dan boleh dicabut/ditarik kembali, hanya manfaatnya saja yang didistribusikan/sedekahkan, berposisi sebagai *al-‘Ariyyah* yang tidak menjadi sebuah keharusan (lazim). Transaksi tersebut akan gugur apabila ia mati, dan harta wakaf tersebut bisa diwariskan atau dihibahkan, dan dijual sebagaimana ditetapkan dalam hukum *al-‘Ariyyah*.

Adapun dasar pendapat imam Abu Hanifah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthny dari Ibnu Abbas “tidak ada yang bisa menahan dari apa yang diwajibkan (warisan) Allah”. Penarikan harta wakaf yang dilakukan oleh orang yang berwakaf menurut Imam Abu Hanifah diistinbathkan berdasarkan *istihsan* yakni dengan memberi ganti yang lebih baik, karena manfaat itu tidak akan dapat terwujud kecuali dengan menggantinya apabila telah rusak atau tidak dapat memberi manfaat lagi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala Puji bagi Allah, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF MENURUT PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH”.

Shalawat beserta salam tak lupanya tercurahkan buat baginda Rasul, yang mana dulu umat menyembah api membara dan berhala, yang tidak mengenal dengan prikemanusiaan dan berbuat adil, yang mana pada waktu itu terjadinya yang kuat menindas yang lemah dan dengan hadirnya sang pujangga alam berobah menjadi menyembah Allah SWT, dan membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berarti sekali sepanjang hidup penulis. Dengan segala kemampuan penulis berusaha menyelesaikan karya ini sehingga dapat disajikan dihadapan pembaca sekalian. Rampungnya penulisan ini tentu tidak terlepas dari bantuan keluarga penulis, kalangan akademik UIN SUSKA dan teman-teman sekalian, karena itu penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta NAREN dan Ibunda tersayang NURLATIFAH, Iyung Mizi, kak Ira, ilung Deni, inte, adik, serta kakak dan bang ipar, semua keluarga penulis yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Juga kepada seseorang kakanda Deki, yang telah banyak memberi bantuan suport, moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nazir Karim, selaku rektor UIN SUSKA Pekanbaru, yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum beserta pembantu Dekan I, II dan III yang telah memberi kesempatan dan membina penulis selama kuliah di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal a-Syakhshiyah.

4. Bapak ketua Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah beserta sekretaris jurusan yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN SUSKA Pekanbaru.
5. Bapak H. Marzuki, M.A yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa selesai sesuai dengan yang diharapkan.
6. Ibu Dra. Yusliati, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Amrul Muzan, M.Ag, Ibu Dra. Irdamiraini MA, yang telah banyak memberikan nasehat dan motivasi pada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membina penulis dalam perkuliahan, Bapak dan Ibu staf Kasubak dan Subag serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
9. Pimpinan dan Pegawai perpustakaan UIN SUSKA RIAU, Perpustakaan Syariah dan Ilmu Hukum, dan Perpustakaan Soeman HS Provinsi RIAU.
10. Seluruh rekan-rekan IPM-KTM, KKN yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan teman-teman semua di Jurusan AH, suryadi S.Sy, dan kakak sriyani S.Sy yang telah memberi motivasi penulis dalam usaha melepaskan status mahasiswa.
11. Sahabat-sahabatku seperjuangan, Susi, Kak Rani, Icun, Katai, Abe, Ulung, Ire, Dita, Itut, Wati, Bang Rano, Rina S.PI, Bang Jep S.Sy, Bang Rudi S.P, Bang Azi S.E.

Semoga Allah meridho'i dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga tidak menapikan bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri.

Penulis, September 2012

JUMRAWAT

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A.. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH	
A. Sejarah Kelahiran Abu Hanifah	13
B. Pendidikan dan Perjuangan Abu Hanifah	16
C. Karya-karya Monumental Abu Hanifah	22
D. Situasi Ekonomi dan Politik Imam Abu Hanifah	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Pengertian Wakaf	30
B. Rukun Wakaf.....	36
C. Syarat-syarat Wakaf	49
D. Macam-macam Wakaf	50
BAB IV PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF MENURUT IMAM ABU HANIFAH	
A. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf	54
B. Istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf	56
C. Analisa Terhadap Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan di bidang material maupun spiritual. Sebagaimana halnya zakat, wakaf merupakan income dana umat Islam yang sangat potensial bila dikembangkan. Sebagai contoh Mesir yang telah berhasil memprogram wakaf sejak seribu tahun yang lalu.

Sebagaimana tersirat dalam Undang-undang Republik Indonesia no 41 tentang wakaf pasal 5; “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”¹.

Wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *Hablun min Allah* dan *Hablun min an-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian².

¹ Undang-undang Republik Indonesia no 41 tentang wakaf dan kompilasi hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 186.

² Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 409.

Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu di manfaatkan. Sebagaimana yang di jelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW:

حدثنا يحيى بن ايوب و قتيبة, يعني ابن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء, عن أبيه, عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ص.م قال : اذا مات الانسان انقطع من عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله. (رواه مسلم)³

Artinya: "Yahya bin Ayyub, Qutaibah – maksudnya Ibu Sa'id – dan Ibnu Hajar mereka berkata : Ismail bercerita kepada kami – dia adalah Ibnu Ja'far – dari al-'Alla' dari ayahnya dari Abu Hurairah R.A. Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah bersabda: Apabila manusia telah meninggal dunia maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya."⁴ (H.R. Muslim)

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “ ” asal kata “ ” berarti menahan atau berhenti atau berdiam di tempat atau tetap berdiri. Para ahli fiqih menyatakan wakaf secara terminologi menggunakan dua kata, yaitu dan . Karena itu sering digunakan kata seperti atau untuk menyatakan kata kerjanya⁵.

³ Imam Abi Al-Husein Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), h. 638.

⁴ M. Nashiruddin Al-Bani (Pent. Elly Latifah), *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 473.

⁵ Departemen Agama RI., *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1.

Dalam kamus al-Munawwir dinyatakan bahwa al-habsu artinya menahan atau dapat juga diartikan al-man'u (mencegah, merintangi atau menghalangi) seperti dalam kalimat **لَشَيْءٍ** (menahan sesuatu)⁶

Dasar hukum wakaf adalah Surat Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^٧ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”⁷.

Pada ayat di atas jelaslah bahwa amalan wakaf itu sangat dianjurkan, terlihat pada kalimat: bahwa manusia belum sampai pada taraf kebijakan yang sempurna sebelum ia menafkahkan sebagian harta yang dicintainya dengan kata lain kebaikan akan tergapai dengan wakaf.

Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beirha, sebuah kebun yang terkenal⁸. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf. Dan pada surat yasin ayat 12:

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 249.

⁷ Lembaga Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 91.

⁸ Abi 'Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Al-Qahirah: Dar Ibnu Al-Haitsim, 1425), h. 325-326.

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي
 إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan Kami-lah yang menghidupkan orang yang sudah mati dan menuliskan apa-apa yang sudah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan”⁹

Ayat ini juga menjadi dalil disyariatkannya wakaf karena dalam ayat ini menerangkan bahwa diantara hal-hal yang merupakan bekas-bekas peninggalan orang yang sudah wafat dan dituliskannya pahala untuk mereka adalah wakaf.

Menurut Imam Syafi’i dan para ulama Syafi’iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Menurut Imam Hambali wakaf yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Menurut Imam Maliki wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif¹⁰.

⁹ Depag. RI, *op, cit*, h. 707.

¹⁰ http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian_Wakaf. diposting tgl 23 Oktober 2007, diakses tgl 25 Agustus 2011.

Menurut Imam Malik harta wakaf masih menjadi milik w qif namun tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau men-tasharruf-kannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan¹¹.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf seperti pinjam-meminjam, sebagaimana yang dikatakan Imam Abu Hanifah dalam kitab *Al-Mabsuth* beliau mengartikan wakaf seperti pinjam meminjam karena kebolehan menjadi seseorang yang mewakafkan itu, kepemilikannya tetap milik wakif, hanya manfaatnya saja yang diberikan apa yang disebutkan dalam wakaf tersebut¹².

Maksudnya yaitu menahan materi benda (al-‘ain) milik W qif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* karya Ibnu Hammam, Imam Abu Hanifah berpendapat¹³:

قال ابو حنيفة : لا يزول ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به حاكم او يعلقه بموته فيقول اذا مت فقد وقفت داري على كذا".

Artinya: "Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan w qif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika

¹¹ Ahmad ibn Muhammad al-Dardiriy, *Syarh al-Shagir 'ala Mukhtar Aqrib al-Masalik li Mazhab Imam Malik*, (Mesir: Dar al-Tahrir wa al-Nasyr, 1968), jilid 4, h. 107.

¹² Syamsuddin As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Alamiyah, 490 H), h. 27.

¹³ Sebagaimana dikutip dalam Ibnu Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, (Bairut, Darul Kutub, t.t.), h. 37.

sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: "Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya."

Dalam kitab Fathul Qodir juga disebutkan:

عند أبي حنيفة : حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية¹⁴

Artinya: "Menurut Imam Abu Hanifah: menahan wujud benda (yang diwakafkan) masih milik w qif dan menyedekahkan manfaatnya seperti layaknya pinjam-meminjam".

Imam Abu Hanifah memperbolehkan harta wakaf untuk dijual, diwariskan atau dihibahkan karena menurut Imam Abu Hanifah wakaf itu seperti pinjam-meminjam jadi kekuasaan atas harta itu masih milik si w qif, sekalipun tidak dinyatakan bahwa wakaf tersebut untuk dirinya sendiri sehingga w qif atau ahli warisnya boleh mengambil kembali harta wakaf itu sewaktu-waktu ketika ia menghendaknya¹⁵.

Memahami adanya penjelasan di atas maka menurut penulis penelitian terhadap pandangan Imam Abu Hanifah sangat menarik untuk dikaji kerana pendapatnya berbeda dengan pendapat para Imam madzhab yang lain, maka penulis akan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **"PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF MENURUT PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH"**.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muhammad jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004), h. 660.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis akan membatasi penulisan ini pada analisa tentang penarikan kembali harta wakaf menurut pandangan Imam Abu Hanifah.

C. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf?
2. Bagaimana istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf?
3. Bagaimana Analisa terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf.
- b. Untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf.

- c. Untuk mengetahui Analisa terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam, tentang hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan penarikan harta wakaf menurut pendapat Imam Abu Hanifah.
- b. Sebagai sarana bagi penulis sendiri untuk mengetahui lebih mendalam tentang penarikan harta wakaf menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung¹⁶. Sumber data primer dalam hal ini adalah kitab *Al-Mabsuth* Karangan Syamsuddin As-Sarkhasi.
- b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer¹⁷. Adapun sumber-sumber tersebut adalah artikel-artikel serta buku-buku lain yang menunjang dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Yakni, *Fathul Qad r* Karya Imam Ibnu Hammam yang bermazhab Hanafiyah, buku *Fiqih Wakaf* dari Departemen Agama RI., buku *Fiqih Lima Madzhab* karangan M. Jawad Mughniyah, buku *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqh Kontemporer* karangan H. E Hassan Saleh, buku *Fiqh Sunnah* dan buku *Manajemen Wakaf Produktif* karangan Munzdir Qohaf dan kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili dan lain-lain.
- c. Selanjutnya data tertier atau bahan penunjang, yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Misalnya, Kamus Bahasa Arab, Ensiklopedia dan sebagainya¹⁸.

3. Analisa Data

¹⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-Dasar Metode Teknik)*, (Tarsito, Bandung, 1990), h. 134.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 184.

Dengan menggunakan *Content Analisis* atau analisis isi yakni dengan jalan menelaah atau mempelajari kosa kata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulis atau tempat kejadian tertentu.

4. Metode Penulisan

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus¹⁹. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat secara umum para tokoh dan ulama tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penarikan kembali harta wakaf, sehingga penulis dapat mengetahui secara umum tentang masalah itu sendiri.

b. Induktif

Metode Induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari cara yang khusus, peristiwa yang kemudian dari fakta khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum²⁰. Penulis akan menerapkan metode ini dalam bab IV, yaitu untuk memahami konsep penarikan kembali harta wakaf Imam Abu Hanifah mulai dari latar belakang pendapat dan argumentasinya yang bersifat khusus, kemudian penulis analisa dengan pendapat umum tentang penarikan kembali harta wakaf.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 19989), cet. 3, h. 5.

²⁰ *Ibid.*

c. Deskriptif Analitik

Yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis berusaha memaparkan pandangan Imam Madzhab Hanafi melalui data yang telah ada kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar diperoleh suatu kejelasan bagaimana pandangan Imam Madzhab Hanafi tentang penarikan kembali harta wakaf.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Terkait tentang Pendahuluan. Di dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berkaitan tentang Biografi Imam Abu Hanifah, yang meliputi Sejarah kelahiran Imam Abu Hanifah, pendidikan dan perjuangan Imam Abu Hanifah, Karya-karya Monumental Abu Hanifah, situasi ekonomi dan politik Imam Abu Hanifah,

BAB III : Tinjauan Umum tentang Wakaf, yang mencakup: pengertian wakaf, rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, dan macam-macam wakaf.

BAB IV : Penarikan kembali harta wakaf menurut pandangan Imam Abu Hanifah, yang berisi tentang penarikan kembali harta wakaf, istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang kebolehan penarikan kembali harta wakaf, dan Analisa terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Kepustakaan

BAB II

BIOGRAFI ABU HANIFAH

A. Sejarah Kelahiran Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriyah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalannya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.

Nama beliau sebenarnya dari mulai kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia¹.

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Manakala neneknya Zauhta adalah hamba kepada suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia

¹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliki, Syafi'iy, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet ke 9, h. 19.

menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan².

Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah islam sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja Bani Umayyah yang ke V) dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan *Hanifah*, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain: sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan "*hanif*" dalam bahasa arab artinya "cendrung atau condong" kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan "tinta". Karena perkataan "hanifah" menurut lughat Irak, artinya "dawat atau tinta". Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah³

² Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil judul Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), Cet 3, h. 15.

³ Moenawar Chalil, *op. cit*, h. 20.

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang alim besar, dan terkenal di segenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka Beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah. Setelah ijthiat dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh orang banyak, maka ijthihad beliau itu dikenal orang dengan sebutan “Mazhab Imam Hanafy”⁴.

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang diinginkanya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, beribawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya(menurut Hamdan putranya)⁵.

Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk di tempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya⁶. Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik; tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan

⁴ *Ibid* .

⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman Judul 60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2007), Cet ke 2, h. 170

⁶ Moenawar Chalil, *op. cit*, h. 21.

orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat, ikut duduk di majlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan ia antarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya⁷.

B. Pendidikan dan Perjuangan Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang. karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karenanya Asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran Asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usahanya sama sekali.

⁷ Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet 1, h. 46.

Kufah di masa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana diajar filsafah Yunani, hikmat Persia dan di sana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufah lah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana di sana pula lahir ahli-ahli ijtihaad terkenal. Di Kufah kala itu terdapat tiga halqah ulama: Pertama, halqah untuk mengkaji (mudzhakarah) bidang akidah. Kedua, halqah untuk bermudzhakarah bidang hadits. Ketiga, halqah untuk bermudzhakarah dalam bidang fiqh. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh⁸.

Abu Hanifah berjumpa dengan tujuh sahabat nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat nabi itu diantaranya: 1. Anas bin Malik; 2. Abdullah bin Harits; 3. Abdullah bin Abi Aufa; 4. Watsilah bin al Asqa; 5. Ma'qil bin Yasar; 6. Abdullah bin Anis; 7. Abu Thafail ('Amir bin Watsilah). Dengan para ulama yang terkenal, Abu Hanifah belajar ilmu pengetahuan pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap negeri atau kota yang didengar oleh beliau ada ulama besar yang terkenal, maka dengan segera beliau datang dan belajar atau berguru kepadanya, meskipun hanya dalam waktu yang singkat.

Guru-guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in". Dari antara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H);

⁸ *Ibid.*

Imam Nafi' Mu'alla Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H). Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling mashur ialah Imam Hammdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H); Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun. Dintaranya juga orang pernah menjadi guru Abu Hanifah yaitu Imam Muhammad Al Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in⁹.

Abu hanifah seorang imam dan ahli fiqh yang merdeka disamping mendapat pujian dan sanjungan dari ulama-ulama besar, juga tidak terlepas dari kritik-kritik penentangannya. Kebanyakan orang yang mencelanya adalah orang-orang yang tidak mampu menandingi pikirannya, atau tidak mencapai puncak yang dicapainya atau masuk golongan orang yang tetap bertahan pada gaya lama, tidak menerima gaya baru, dan tiap-tiap gaya baru dianggap bid'ah. Hal ini adalah sebagai bukti bahwa manusia tidak ada yang terlepas dari kedengkian orang.

Walaupun beraneka macam kritik orang, namun sejarah tidak menghargai kritik-kritik itu dan tetap menyambut pujian-pujian yang diberikan kepada Abu Hanifah. Suara-suara pujian terus-menerus bergema didalam masyarakat hingga sekarang ini. Ilmunya dan pribadinya dipuji dan disanjung orang walaupun jalan pikirannya kadang-kadang tidak disetujui.

⁹ Moenawar Chalil, *op. cit*, h. 22-23.

Abu Hanifah adalah gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi, dapat dikeluarkannya dari tempatnya. Dia telah menggoncangkan masa dengan ilmunya, dengan fikirannya, dan dengan diskusinya. Dia berdiskusi dengan ulama-ulama kalam, dia menolak paham-paham mereka yang tidak disetujuinya. Dia mempunyai pendapat dalam bidang kalam, bahkan ada risalah-risalahnya, dia mempunyai musnad dalam bidang hadits walaupun dia mencapai puncak tinggi dalam bidang fiqh dan takhrij, dan menggali illat-illat hukum. Memang dia amat baik menghadapi hadits, dia ungkapkan illat-illatnya dan memperhatikan apa yang tersirat pada kata-kata itu, dan dia memandang uruf sebagai suatu dasar hukum.

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang mengarahkannya ialah:

1. Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun yang diusahakan, kemudian menjadi suatu malakat padanya. Ringkasnya sifat-sifat yang mengarahkan jalan pikirannya dan kecenderungannya.
2. Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang dilaluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian Abu Hanifah mengambil salah satunya.
3. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-penderitaannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga ke ujungnya.

4. Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya yang mempengaruhi sifat-sifat pribadinya.

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat yang mendudukannya ke puncak ilmu diantara para ulama. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu diantaranya¹⁰:

1. Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang ambingkan pengaruh-pengaruh luar
2. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar. Pernah dia mengatakan Ah-Hasan al-Bisri.
3. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. Hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.
4. Suka meneliti segala yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi terus mendalami isinya.
5. Mempunyai daya tangkap yang luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.

Abu hanifah di kala belajar kepada Imam Amir Syarahil Asy Syu'by (wafat pada tahun 104 H), Asy Syu'bi ini telah melihat dan memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu (khusus) di majlis-majlis para ulama, para cerdik pandai yang ternama waktu itu¹¹.

¹⁰ *Ibid.* h. 26-28.

¹¹ *Ibid.*

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan selanjutnya beliau mengerjakan dengan benar-benar. Yakni, sejak waktu itulah beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan keagamaan dengan seluas-luasnya.

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari pengetahuan tentang kepercayaan kepada Tuhan atau sekarang disebut “ilmu kalam” dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan membicarakannya. Sehingga beliau sering bertukar fikiran atau berdebat masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah berpendapat bahwa “ilmu kalam” adalah satu-satunya ilmu yang paling tinggi dan amat besar kegunaanya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam bahagian pokok-pokok agama (ushulud-din).

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain. Yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu “fiqih” , ialah ilmu agama yang di dalamnya hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang berkenaan dengan hukumnya, baik yang berkenaan dengan urusan ibadat maupun berkenaan dengan urusan mu’amalat atau masyarakat.

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu fiqih, ialah sebagaimana pengakuan dan pernyataan para cerdik pandai, dan alim ulama di kala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman, seorang guru

beliau yang paling lama, setelah mengetahui kepandaian beliau tentang ilmu fiqih, maka sewaktu-waktu ini beliau pergi keluar kota atau kedaerah lain, terutama di kala beliau pergi ke Bashrah dalam waktu yang lama, maka beliau (Hanafi) lah yang disuruh untuk mengganti atau mewakili kedudukan beliau, seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum agama dan memberi pelajaran kepada para murid beliau.

Imam Abu Hanifah di kenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, “Tahukah kalian, siapa dia?”. Mereka menjawab “Tidak”. Ia berkata, “Dialah Nu'man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang mesjid itu emas, niscaya perkataanya dipakai sebagai argumen.” Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya¹².

C. Karya-karya Monumental Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang ahli tentang *fiqih*, keahliannya jarang didapat tandingannya pada masa itu, dan juga ahli tentang *ilmu kalam*. Maka di kala beliau masih hidup, tidak sedikit para ulama yang menjadi murid atau berguru kepada beliau, dan tidak sedikit juga para cerdik pandai yang ikut mengambil atau mengisap ilmu pengetahuan beliau. Oleh sebab itu, di kala beliau telah wafat, diantara para ulama terkenal menjadi sahabat karib beliau,

¹² Hapi Andi bastoni, *op. cit*, 47

seperti Imam Abu Yusuf. Imam Muhammad bin Hasan, Imam Hasan bin Ziyad dan lainnya. Meskipun mereka dari sebagian masalah-masalah hukum keagamaan yang menyalahi, ada yang berlawanan dan ada pula yang berbeda pendapat atau buah pikiran beliau: tetapi sebagian besar mereka itu telah menyepakati sesuai dengan jalan yang ditempuh atau dilalui beliau¹³.

Menurut riwayat, bahwa para ulama Hanafi (yang bermazhab hanafi) telah membagi-bagi masalah “fiqih” bagi mazhab beliau ada tiga bagian atau tingkatan. Yakni: tingkatan pertama dinamakan “Masa-ilu-usul”; tingkatan kedua dinamakan “Masa-ili-nawadir”, dan tingkatan ketiga dinamakan “Al-fatawa wal Waqi’at”¹⁴.

Yang dinamakan dengan “Masa-ilu-usul” itu kitabnya dinamakan “Dlahirur-Riwayah”. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabanya yang terkenal, seperti Abu Yusuf dan lain-lainnya. Tetapi dalam kitab ini berisi masalah-masalah keagamaan, yang sudah dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh beliau, lalu dicampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat dari para sahabat beliau yang terkenal tadi. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun “Masa-ilu-usul” itu dalam enam kitab “Dlahirur-Riwayah”, yang mana kitab itu ialah:

- Kitab al-Mabsuth
- Kitab al-Jami’ush-Shaghir
- Kitab al-Jami’ul-Kabir

¹³ Moenawar Chalil, *op. cit.*, h. 73-77.

¹⁴ *Ibid.*

- Kitab as-Sairush-Shaghir
- Kitab as-Sairush-Kabir
- Kitab az-Ziyadat

Sebab dinamakan dengan “Dlahirur-Riwayah”, karena masalah-masalah yang diriwayatkan itu dari Imam Muhammad Hasan dengan riwayat-riwayat yang kepercayaan (*tsiqoh*), yang berbeda dengan “Masa-ilun-nawadir”. Tentang keadaan enam macam kitab itu, pada masa permulaan abad IV Hijrah telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl Muhammad bin Ahmad Marwazy, yang terkenal dengan nama Al-Hakim Asy-Syahid, wafat pada tahun 334 H. Dan kitabnnya dinamakan “al-Kafy”. Kemudian Kitab “al-Kafy” ini disyarah (diberi penjelasan) oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as Sarkhasy, wafat pada tahun 490 H, dan kitabnya dinamakan “Al-Mabsuth”.

Dalam buku perkembangan ilmu fiqh di dunia Islam disebutkan, bahwa keenam kitab ini dikumpulkan dengan nama *Al-kaafiy* oleh Hakim Asy-Syaahid. *Al-kaafiy* tersebut disyarahi oleh Asy-Syarakhsyi dengan nama *Al-Mabsuth* juga, sebanyak 30 jilid/juz. Dari kitab-kitab *Dhaahirur-Riwaayah* ini pemerintah Usmaniyah mengambil bagian-bagian penting yang dihimpun di dalam *Majallatul-Ahkaamil-Adliyah* pada abad XIX M. Setelah zaman murid-murid Abu Hanifah, tampil pula murid-murid dari murid-murid Abu Hanifah yang menyusun kitab-kitab fiqh, antara lain: Asy-Syarkhsi menyusun kitab *Al-Mabsuth*, Alaa’uddiin Abi Bakr Ibn Mas’ud Al-Kasaaniy-Al-Hanafi

(wafat 587 H), menyusun *Badaa-i'ush-Shana-i'fii Tartiibisiy-Syaraa-i' dan lain-lain*¹⁵.

Dan yang dinamakan dengan “Masa-ilun-nawadir”, ialah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan para sahabat beliau dan dalam kitab lain, yang selain kitab “Dlahirur-Riwayah” tersebut ialah: seperti “Haruniyyat” dan “Jurjaniyyat” dan “Kaisaniyyat” bagi Imam hasan bin Ziyad.

Adapun yang dinamakan dengan “Al Fatawa wal-Waqi’at, ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istinbathnya para ulama mujtahid yang bermazhab Imam Hanafi yang datang kemudian, pada waktu mereka ditanyai tentang masalah-masalah hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat jawabannya, lantaran dalam kitab-kitab mazhabnya yang terdahulu tidak didapati keterangannya, maka mereka lalu berijtihad guna jawabannya. Dan tentang keadaan kitab “al-Fatawa wal-Waqi’at yang pertama kali, ialah kitab “an-Nawazil” yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits As Samaarqandy, wapat pada tahun 375 Hijrah.

Perlu dijelaskan tentang keadaan kitab “*Dlahirur-Riwayah*” tersebut¹⁶:

- a. Kitab “*Al-Mabsuth*” kitab ini adalah kitab sepanjang-panjang kitab yang dihimpun dan disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan, yang didalamnya berisi beribu-ribu masalah keagamaan yang dipegang dan ditetapkan oleh Imam Hanafi yang berisi pula beberapa masalah keagamaan yang menyalahi pegangan atau penetapan beliau yang utama itu, ialah dari imam

¹⁵ Rahmad Djatnika, Amir Syarifuddin dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, (Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama/ IAIN di Jakarta Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI, 1986), h. 16-17.

¹⁶ Moenawar Chalil, *op. cit*, h. 75- 76.

yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan berisisi pula tentang perselisihan pendapat antara Imam Hanafi dengan Imam Ibnu Abi Laila. Orang yang meriwayatkan kitab “*Al Mabsuth*” tadi ialah Imam Ahmad bin Hafsh Al-Kabir, seorang alim ulama besar bekas murid Imam Muhammad bin Hasan.

- b. Kitab “*Al-Jami’ush-Shaghir*” kitab ini berisi beberapa masalah yang diriwayatkan dari Imam Isa bin Abban dan Imam Muhammad bin Sima’ah, yang kedua beliau ini pun murid Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab ini berisi 40 pasal dari pada pasal-pasal fiqih, yang permulaannya pasal “*Ash-Shalah*” tetapi didalam kitab ini tidak diberi bab-bab pasalnya. Oleh sebab itu lalu di atur, disusun dan di bab-bab oleh Al-qadli Abuth-thahir, Muhammad bin Muhammad ad-Dabbas, untuk memudahkan bagi barang siapa yang hendak mempelajarinya.
- c. Kitab “*Al-Jami’ul-Kabir*” kitab ini berisi seperti kitab-kitab yang kedua tadi, hanya saja ada lebih panjang uraian dan keterangannya.
- d. Kitab “*As-Sairus-Shaghir* “ kitab ini berisi masalah-masalah ijtihaad semata-mata.
- e. Kitab “*As-Sairul-Kabir*” kitab ini berisi masalah-masalah fiqh, karangan terakhir dari Imam Muhammad bin Hasan, orang yang pertama kali meriwayatkan kitab ini dari Imam Muhammad bin Hasan, ialah Imam Abu Sulaiman al-Jauzajany dan Imam Ismail bin Tsuwabah.

Adapun dasar-dasar ijtihaad Abu Hanifah dalam menyelesaikan masalah fiqih adalah kitabullah, sunnaturnasul, dan atsar-atsar yang shahih

serta telah masyhur (diantara para ulam yang ahli), fatwa-fatwa sahabat, qiyas dan istishan serata adat yang telah berlaku didalam masyarakat umat islam¹⁷. Sepanjang riwayat, bahwa Imam Hanafi adalah seorang yang mula-mula sekali yang merencanakan ilmu fiqih dan mengatur serta menyusunnya dengan di bab-bab sepasal demi sepasal untuk memudahkan orang yang mempelajarinya. Karena dimasa para sahabat dan para tabi'in fiqih itu belumlah dihimpun dan disusun, beliau setelah menguatirkan hilangnya ilmu pengetahuan itu, barulah beliau merencanakan mengatur dan menyusunnya menjadi beberapa bab¹⁸.

Perlu dijelaskan bahwa Imam Hanafi ada mempunyai kitab yang dinamakan dengan "*Al-Fiqhul-Akbar*" kitab ini berisi khusus urusan ilmu kalam, ilmu aqaid atau ilmu tauhid, kitab ini diriwayatkan dari Imam Abi Muthi Al Hakam bin Abdullah Al Bakhy; kemudian disyarah oleh Imam Abu Manshur Isma'il Al Maturidy, dan oleh Imam Abil Muntaha Al Maula Ahmad bin Muhammad Al Maghnisnya. Abu Hanifah belajar fiqih kepada ulama aliran Irak (ra'yu) ia dianggap repesentatif untuk mewakili pemikiran ra'yu, oleh karena itu perlu mengetahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari sehubungan guru-murid kita dapat menyaksikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran ra'yu¹⁹.

¹⁷ Roestan dkk, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*, (Jakarta; CV. Kalam Mulia, 1992), Cet. Ke-1, h. 360.

¹⁸ *Ibid* , h. 361.

¹⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* , (Bandung : PT Remaja Rosda Karya th), h. 73.

Perkembangan pemecahan masalah dengan prinsip-prinsip ijtihad telah dikembangkan secara luas oleh Abu Hanifah. Seorang ulama dalam bidang fikih. Dalam menetapkan ijtihadnya beliau banyak menggunakan ro'yu (rasio/hasil pemikiran manusia). Banyak pemecahan-pemecahan alternatif yang beliau berikan dan kemukakan yang berbeda dari pada ulama lainnya pada waktu itu. Dibalik pro dan kontra pendapatnya dengan beberapa ulama fikih mengenai istinbath beliau dalam bidang fikih adalah seorang pendidik yang mengajarkan tentang penganalisaan suatu masalah dengan pencairan (alasan) serta hukum dibalik teks-teks tertulis menggunakan metode berfikir secara analisis dan kritis²⁰.

D. Situasi Ekonomi dan Politik Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah adalah seorang putera dari seorang saudagar besar dikota Kufah, maka sudah barang tentu beliau sejak mulai kecil selalu dalam kelapangan dan jarang menderita kekurangan. Pada awalnya Abu Hanifah seorang pedagang bahan pakaian, beliau sejak dari mudanya terdidik dalam urusan berdagang dan berniaga. Oleh sebab itu, sekalipun beliau telah menjadi seorang ilmu dan seorang alim terkemuka, namun berniaga/berdagang dapat juga.

Pencarian beliau pada masa itu ialah berdagang kain pakaian bersama handaitaulan nya. Selain itu ada yang diriwayatkan pula, bahwa beliau adalah seorang yang pertama kali mendapat pengetahuan membuat batu

²⁰ Suwito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran para Tokoh Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 37.

ubin. Dikala itu beliaulah yang bersusah-payah membikin dan mengaturnya²¹. Beliau seringkali menyuruh para kawannya supaya menjualkan dagangannya ke lain kota, seperti di Bagdad dan lain-lain. Oleh karena itu, beliau termasuk seorang alim besar yang berharta dan lapang penghidupannya, dan juga beliau termasuk terkenal pula sebagai seorang yang dermawan²².

Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyah. Alih kekuasaan dari Umayyah yang runtuh kepada Abbasiyah yang naik tahta, terjadi di Kuffah sebagai ibu kota Abbasiyah sebelum pindah ke Baghdad. Dari perjalanan hidupnya itu, Abu Hanifah sempat menyaksikan tragedi-tragedi besar di Kufah. Disatu segi kota Kufah ia merasakan sebagai kota teror yang diwarnai dengan politik.

Kota Basrah dan Kufah di Irak melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang. Kedua kota bersejarah ini mewarnai intelektual Abu Hanifah ditengah berlangsung nya proses transpormasi sosio-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan dan persi²³.

²¹ Moenawar Chalil, *op, cit* h. 23-24.

²² *Ibid.*

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. Ke-1, h. 97-98.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah¹. Wakaf bila dijamakkan menjadi اوقاف dan وقوف, sedangkan kata kerjanya (*fi'il*) adalah وقف. Menurut arti bahasanya, *waqofa* berarti menahan atau mencegah, misalnya وقف عن السير “Saya menahan diri dari berjalan²”.

Menurut syari’at, wakaf adalah *habsul ashli wa tasbiluts tsamrah* (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya). Artinya, menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah³. Dalam bahasa Indonesia Kata wakaf diucapkan dengan wakaf ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia. Menurut istilah lain, wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama,

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di bIndonesia*, (jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. Pertama, h. 51.

² Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), h.635.

³ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, Serikat Penerbit Islam, 2010), Cet. Ke- 1, Jilid 2, h. 424.

sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT⁴.

Dalam istilah *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*) , lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan⁵.

Wakaf itu suatu ibadah yang disyari'atkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan lapadh, walaupun tidak ditetapkan (diakui) oleh hakim, dan hilang miliknya si wakif daripadanya, walaupun barang itu tetap ada ditangannya⁶. Wakaf merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan di bidang material maupun spiritual. Sebagaimana halnya zakat, wakaf merupakan income dana umat Islam yang sangat potensial bila dikembangkan. Sebagai contoh Mesir yang telah berhasil memprogram wakaf sejak seribu tahun yang lalu.

⁴ Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta, 23 Jan 1986), Cet. Ke-2, h. 207.

⁵ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1.

⁶ T. Muhammad Hasbi As-Soddiqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), cet ke- 1, h. 179.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia no 41 tahun 2004, di dalam pasal 1 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah⁷.

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefenisikan wakaf menurut terminologi. Abu Hanifah mengatakan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikanya kepada yang

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada) h. 354.

lain, baik dengan tukar atau tidak⁸. atau “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama⁹.”

Menurut golongan Hanbali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

Secara singkat Sayyid Sabiq, mengartikan wakaf dengan menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah. Kompilasi Hukum Islam merumuskan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Allah telah mensyari’atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Dari beberapa ayat yang dijadikan sebagai dasar adanya wakaf diantaranya adalah¹⁰.

Dasar hukum wakaf Surat Ali Imron ayat 92:

⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih Wqaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Waqaf, 2007), h. 2.

⁹ Abd. Shomad, *HukumIslam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 370-371.

¹⁰ *Ibit.*

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^{١١} وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”¹¹.

Begitu juga firman-nya dalam surat Al-Baqarah: 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ^{١٢} ﴿٢٦٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu....”

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan¹². Wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *Hablun min Allah* dan *Hablun min an-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian¹³.

¹¹ Lembaga Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 91.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, jilid10, h. 273.

¹³ Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 409.

Para ulama menilai bahwa wakaf itu termasuk kategori sedekah jariyah yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bisa dipetik. Dalam konteks inilah maka para fukaha mengemukakan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai salah satu sandaran wakaf¹⁴.

Sebagaimana yang di jelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW:

حدثنا يحيى بن ايوب و قتيبة, يعني ابن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء, عن ابيه, عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله ص.م قال : اذا مات الانسان انقطع من عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم)¹⁵

Artinya: "Dari Abu Hurairah R.A. Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah bersabda: Apabila manusia telah meninggal dunia maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya.¹⁶" (H.R. Muslim)

Harta wakaf adalah amanah Allah yang terletak ditangan nazir. Oleh sebab itu, nazir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan pengembangannya. Harta wakaf bukanlah hak milik si Nazir. Nazir hanya berhak mengambil sekadar imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf itu. Lebih dari itu sudah dianggap mengkhianati amanah Allah. Oleh karena begitu penting kedudukan nazir dalam perwakafan, maka pada diri si nazir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), Cet. Ke-1, h. 104.

¹⁵ Imam Abi Al-Husein Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *op. cit.*

¹⁶ M. Nashiruddin Al-Bani (Pent. Elly Latifah), *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 473.

dipenuhi yaitu, balig berakal, dan mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya. Seorang pengkhianat atau pembohong tidak layak untuk dijadikan nazir dalam perwakafan. Selain itu, yang akan menjadi nazir hendaklah seorang yang mempunyai kesediaan dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Dua persyaratan itu adalah penting, karena tanpa itu, harta wakaf akan terputus dan tersia-sia¹⁷.

B. Rukun wakaf

Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah *sighat* (ucapan, pernyataan tegas). *Sighat* adalah lapazh-lapazh yang menunjukkan makna wakaf seperti, “tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin,” dan lapazh-lapazh sejenis seperti *barang ini diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kebaikan, kebajikan, atau diwakafkan* (saja). Hal ini sesuai dengan ucapan Abu Yusuf dan dijadikan fatwa untuk masalah ‘urf¹⁸.

Rukun wakaf menurut mereka adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. Definisi ini mendasarkan bahwa makna rukun adalah bagian sesuatu yang mana sesuatu itu tidak bisa terwujud kecuali dengan bagian itu.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf itu ada empat rukun¹⁹.

¹⁷ Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet ke- 1, h. 427-428.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 275.

¹⁹ *Ibid*.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:

1. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Syarat wakif, yaitu orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:

- a. Merdeka
- b. Berakal sehat
- c. Dewasa (baligh)
- d. Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)²⁰.

Wakif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya. Seseorang yang akan mewakafkan hartanya harus mempunyai syarat-syarat berikut: *Pertama*, Wakif itu adalah pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan. Harta yang belum jelas pemiliknya tidak boleh diwakafkan, seperti harta warisan yang belum dibagikan, harta berserikat yang belum ditentukan siapa-siapa pemiliknya, harta yang telah dijual tapi belum lunas pembayarannya dan sebagainya²¹.

Kedua, Wakif mempunyai kecakapan melakukan tabarru', yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan tabarru', ialah telah mempunyai

²⁰ Depertemen Agama RI, *op. cit*, h. 21-23.

²¹ Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *op. cit*, h. 212.

kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang dikemukakan kepadanya dengan baik.

Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa orang yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ialah orang yang telah mukallaf. Tanda-tanda mukallaf, ialah telah baligh, berakal dan tidak tidur atau ia sadar apa yang dilakukannya.

Sekalipun beragama islam tidak dinyatakan sebagai syarat seorang wakif, tetapi bila diperhatikan bahwa wakaf itu sebagai suatu amal yang amat besar pahalanya dan syarat memperoleh pahala dari Allah ialah iman dan Islam, maka wakaf-wakaf yang ada pahalanya itu adalah wakaf yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman atau orang yang telah menganut agama islam²².

Pemberi wakaf, haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi orang gila, anak-anak atau orang-orang yang dipandang kurang akalnya tidak sah membuat wakaf. Orang yang terpaksa atau di tipu untuk membuat wakaf, maka wakafnya juga tidak sah²³.

Wakaf harus didasarkan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Para ahli hukum Islam sudah sepakat

²² *Ibid.*

²³ M. Thalib, *Fiqih Nabawi*, (Surabaya Indonesia), h. 204-205.

bahwa wakaf dari orang dipaksa adalah tidak sah hukumnya, begitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya²⁴.

2. Mauquuf (harta yang diwakafkan)

Harta wakaf diisyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik wakif dan dapat tahan lama dalam penggunaannya. Selain itu, objek wakaf harus kepunyaan yang mewakafkan, walaupun *musya* (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan lain)²⁵.

Sebagian besar ulama bersepakat bahwa harta yang diwakafkan itu juga harus *aqar* (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatnya. Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan, karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh *mauquf alaih* dan pahala bagi *wakif*. Untuk itu zat *wakaf* harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis.

Disamping itu, syarat lainnya benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan²⁶.

Harta yang tahan lama dan bermanfaat, seperti tanah dan kebun. Tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa harta selain tanah dan kebunpun dapat diwakafkan asal bermanfaat dan tahan lama, seperti

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 240.

²⁵ Rahmadi Usman, *op cit*, h. 61.

²⁶ *Ibid*.

binatang ternak, alat-alat pertanian, kitab-kitab ilmu pengetahuan, bangunan dan sebagainya²⁷.

Golongan Malikiyah dan Syi'ah, membolehkan wakaf benda-benda yang bergerak, sebab menurut mereka wakaf itu boleh bersifat sementara dan boleh juga bersifat selama-lamanya. Bahkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat dimiliki baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda, binatang, makanan atau emas dapat dijadikan wakaf, jika wakaf itu bersifat sementara maka harta wakaf itu tidak disyaratkan tidak berubah-ubah. Jika wakaf itu selama-lamanya dan benda yang diwakafkan itu adalah benda yang bergerak, maka benda yang bergerak itu dapat ditukar dengan benda yang lain asal benda itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakif dalam mewakafkan hartanya dahulu.

Mazhab Syafi'iyah dan Hambaliah membolehkan wakaf benda yang bergerak sebagaimana dibolehkan mewakaf benda yang tidak bergerak. Sedangkan keabadian suatu wakaf tergantung kepada sifat benda itu sendiri. Jika benda itu tidak mengalami kerusakan, seperti tanah, maka keabadian wakaf itu lebih terjamin, selama tanah itu dapat dimanfaatkan. Sedangkan bagi harta wakaf yang mengalami kerusakan maka keabadian wakaf itu menjadi terbatas sampai benda itu tidak dipakai lagi. Seperti mewakafkan bangunan mesjid, maka keabadian

²⁷ Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *op.cit*, h. 214-215.

wakaf itu terbatas sampai bangunan mesjid itu menjadi rusak, tidak terpakai lagi²⁸.

Pada pasal 15 dan 16 ditentukan bahwa Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi²⁹.

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abd. Shomad, *op. cit*, h. 374.

- f. Hak sewa dan ;
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁰.

Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda tersebut harus *pertama: mutaqawwin (mal mutaqawwin)* yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal, dapat benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, *kedua*: benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti batas-batasannya dan tidak dalam keadaan sengketa, *ketiga*: benda yang diwakafkan itu harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus³¹.

3. Mauquuf 'alaih (tujuan wakaf)

Tujuan wakaf yaitu untuk mencari keridhaan Allah SWT. Termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama Islam dan sebagainya. Tujuan ini merupakan tujuan utama dari wakaf. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk keperluan-keperluan yang berlawanan dengan kepentingan Agama Islam. Seperti untuk mendirikan rumah ibadah agama selain agama Islam, membantu pendidikan agama selain agama Islam³².

³⁰ *Ibid.*

³¹ Abdul Manan, *op. cit*, h. 240-241.

³² Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *op.cit*, h. 216.

Tidak boleh. Tapi kalau misalnya mewakafkan tanah untuk dijadikan jalan umum yang akan dilalui oleh orang Islam dan non Islam (orang kafir), tidak mengapa³³. Untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin, apakah ia orang Islam atau bukan, membantu orang terlantar, karib kerabat, mendirikan sekolah, mendirikan asrama anak yatim dan sebagainya³⁴.

Mauquf ‘ alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukan bagi

- a. Sarana dan kegiatan ibadah,
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa,
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka *nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi³⁵.

³³ Adijani Al-Alabij, Adiyani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1992), *op.cit*, h. 32.

³⁴ Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *loc. cit.*

³⁵ Elsi Kartika, *op. cit*, h. 62.

4. Shighat wakaf

Shighat (lapadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan³⁶.

Lapaz atau shighat ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan³⁷. Menurut jumhur ulama, kalau wakaf tersebut ditujukan kepada orang tertentu, maka hendaklah ada *qabul* (jawab), akan tetapi apabila *wakaf* tersebut ditujukan untuk umum, maka tidak disyaratkan *qabul*³⁸.

Di dalam Pasal 21, Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Nama dan identitas Wakif;
- b. Nama dan identitas Nazhir;
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
- d. Peruntukan harta benda wakaf;

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Adijani Al-Alabij, Adiyani, *op. cit.*, h. 31.

³⁸ Rachmadi Usman, *op. cit.*, h. 62.

e. Jangka waktu wakaf³⁹.

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan yaitu: dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum⁴⁰. Shighat wakaf, ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf. Menurut mazhab Hanafi: shighat wakaf itu hendaklah munjiz, maksudnya ialah wakaf itu telah berlaku setelah selesai shighat wakaf itu diucapkan oleh wakif.

Mengenai pembatasan waktu dalam berwakaf, seperti pernyataan seseorang: “Aku mewakafkan tanah ku ini selama 10 tahun”, maka mazhab Maliki membolehkannya. Hanya saja si wakif akan menerima pahala dari Allah SWT dalam waktu yang terbatas pula, yaitu selama 10 tahun. Karena Allah SWT pasti membalas dengan pahala setiap infak atau sedekah yang diberikan hambanya dengan ikhlas⁴¹.

Mazhab Maliki beralasan bahwa sesuai dengan zahir hadits Ibnu Umar, maka wakaf itu semacam sedekah. Setiap sedekah boleh terbatas waktunya dan boleh pula tidak terbatas waktunya.

Mazhab Syafi’ih dan mazhab Hambali demikian pula mazhab Zahiri berpendapat bahwa selama-lamanya merupakan syarat sahnya wakaf. Jika terjadi suatu wakaf, walaupun tidak disebutkan syarat selama-lamanya, berarti wakif telah melepaskan haknya selama-

³⁹ Muhammad Amin Suma, *op. cit*, h. 360.

⁴⁰ Abd Shomad, *op. cit*, h. 376.

⁴¹ Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *loc. cit.* h. 217.

lamanya. Ia bukan lagi pemilik harta yang telah diwakafkannya itu. Jadi tidak sah suatu wakaf yang hanya untuk waktu tertentu saja. Dasar pendapat mereka ialah hadits Ibnu Umar, yang menyatakan bahwa harta wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan⁴².

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Status shighat (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula⁴³.

Dasar shighat (dalil), perlunya shighat (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf⁴⁴.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 55.

⁴⁴ *Ibid.*

Adapun lafaz shighat wakaf ada dua macam yakni:

1. Lapadh yang jelas (sharih) seperti:

وقف وحبت وسبيلت

Bila lafadh ini dipakai dalam ijab wakaf sah lah wakaf itu, sebab lafadh tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf⁴⁵.

2. Lapadh kiasan (kinayah) seperti:

صدقته وحرمت وابدت

Kalau lafadh ini dipkai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafadh “tashaddaqtu” bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunat. Lafadh “haramtu” bisa berarti dhihar, tapi bisa berarti wakaf. Oleh karena itu harus ada ketegasan niat untuk wakaf. Kemudian lafadh “abadtu” juga bisa berarti semua pengeluaran harta untuk selamanya. Sehingga semua lafadh kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas⁴⁶.

Namun demikian, selain penegasan lafadz yang dipakai dalam shighat (ikrar), perlu kiranya memperhatikan pedoman susunan lafadz shighat:

Pertama, Menggunakan kata yang sharih (jelas) yang menunjukkan pemberian wakaf, yaitu kata “wakaf” saja seperti di atas (Saya mewakafkan...). Penggunaan kata yang sharih tidak perlu

⁴⁵ A. Faisal Haq, A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, (Pasuruan: Jawa Timur, 1993), cet. Ke-1, h. 26-27.

⁴⁶ *Ibid.*

diperkuat dengan niat berwakaf. *Kedua*, menyebutkan obyek wakaf seperti tanah, rumah dan lain-lain. *Ketiga*, menyebutkan seperlunya keterangan yang jelas tentang keadaan obyek wakaf seperti luas tanah, keadaan bangunan dan alamat. *Keempat*, tidak perlu mencantumkan kalimat “ Saya lepaskan dari milik saya”. *Kelima*, memperhatikan empat syarat-syarat wakaf. Perbedaan pendapat yang timbul dalam penerapannya dapat diatasi dengan menetapkan peraturan tertentu⁴⁷.

Secara garis umum, syarat sahnya shighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah: shighat harus munjazah (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis, misalnya berkata: “Saya mewakafkan tanah saya... Atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf”. Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya wakif berkata “Saya mewakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki.....atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli warisnya”.

Shighat tidak diikuti pembatas waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah

⁴⁷ Depertemen Agama RI, *op. cit*, h. 57.

yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan Syari'at, oleh karena itu hukumnya tidak sah. Dan tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan⁴⁸.

C. Syarat-Syarat Wakaf.

Agar amalan wakaf itu sah, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Untuk selama-lamanya.
2. Tidak boleh dicabut.
3. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan.
4. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya⁴⁹.

Selama-lamanya. Maka seseorang yang mewakafkan hartanya dengan membatasi waktunya, misalnya: 1 tahun atau 10 tahun, maka wakafnya ini tidak sah. Diserahkan tunai, dan tidak dapat digugat kembali maksudnya, harta (benda) yang diwakafkan itu harus diserahkan ketika pemberi wakaf menyatakan kehendaknya⁵⁰. Dan harta yang sudah diwakafkan tidak dapat dicabut lagi. Kalau ada seseorang mau memberi wakaf, ia tidak berikan dengan syarat, misalnya: "Saya akan wakafkan buku-buku ini, nanti sesudah pulang haji." Maka wakaf seperti ini tidak sah, karena tidak tunai.

Yang disertai wakaf harus jelas. Misalnya: Saya mewakafkan tanah saya yang dua Ha ini kepada masjid "Al-Falah" Surabaya. Jika yang disertai

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *loc. cit.* h. 219-220.

⁵⁰ M. Thalib, *op. cit.* h.204.

wakaf tidak jelas, maka wakaf seperti ini tidak sah. Misalnya: “Saya wakafkan gedung ini.” Wakaf yang seperti ini tidak sah⁵¹. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya⁵².

D. Macam-macam wakaf.

Menurut Islam, bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam:

1. Wakaf Ahli: wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga siwakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri⁵³. Karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus. Wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam shighat wakaf⁵⁴.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 242-243.

⁵³ A. Faisal Haq, A. Saiful Anam, *op. cit*, h. 3.

⁵⁴ Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *op. cit.* h. 220.

Wakaf ini bertujuan menjaga anak dan cucu, dari yang berwakaf zurri disyaratkan supaya barang yang diwakafkan itu hendaklah mengandung faedah yang tidak putus-putusnya sekalipun turunannya telah habis⁵⁵. Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena siwakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf⁵⁶. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin⁵⁷.

2. Wakaf Khairi: Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk

⁵⁵ Abd. Shomad, *op. cit*, h. 372.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 15.

⁵⁷ *Ibid*.

keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya⁵⁸.

Wakaf khairi atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf dalam hukum Islam yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang memberikan wakaf itu telah meninggal dunia asalkan benda wakaf itu terus dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan⁵⁹.

Wakaf jenis kedua inilah yang banyak terdapat dimana-mana dalam berbagai jenis amal kebaikan. Wakaf ini amat besar faedahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lain, yang bertujuan mulia yang jarang ada dalam sejarah umat-umat lain⁶⁰.

Dasar hukum wakaf khairi ini, ialah hadits yang menerangkan wakaf Umar bin Khattab. Dalam hadits itu disebut “pada jalan Allah”, memerdekakan budak, untuk fakir miskin dan untuk orang terlantar.

⁵⁸ A. Faisal Haq, A. Saiful Anam, *op. cit*, h. 6.

⁵⁹ H. Abdul Manan, *op. cit*, h. 242.

⁶⁰ Abd Shomad, *op. cit*, h. 372-373.

Semuanya ini berhubungan dengan kepentingan umum. Wakaf khairi ini perlu digalakkan dan dianjurkan kaum muslimin melakukannya, karena ia dapat dijadikan modal, untuk menegakkan agama Allah, dan membina sarana keagamaan⁶¹.

⁶¹ Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *op. cit.* h. 222.

BAB IV

PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF MENURUT PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH

A. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf

Imam Abu Hanifah, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II, adalah seorang pencetus madzhab Hanafi (seorang Imam Madzhab) dibidang fikih. Salah satu pemikirannya adalah masalah wakaf. Menurutny, wakaf menurut bahasa adalah الحبس (menahan) dan المنع (melarang/mencegah).¹ Wakaf diperoleh dari dua akar bahasa yakni: وقف – يقف – وقفا dan اوقف – يوقف – ايقافا yang berarti berdiri, berhenti.²

Sedangkan menurut syar'i (terminology) wakaf adalah:

عبارة عن حبس المملوك عن التملك عن الغير

Artinya: “suatu gambaran/ungkapan tentang menahan sesuatu yang dimiliki tidak dapat pula dimiliki orang lain”³

Pengertian diatas memberi penjelasan bahwa Imam Abu Hanifah tidak semata-mata melepaskan harta tersebut secara putus. Kebolehan berwakaf pada dasarnya, dia berpendapat bahwa orang yang berwakaf menahan benda wakaf tersebut, akan tetapi manfaatnya didistribusikan. Oleh karena itu ia

¹ Syamsuddin al-Sarkasyi, *Kitab al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1993), cet ke- 1, juz 11, h.27.

² Mahmud Yunus, *Kamus arab-Indonesia*, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1989),h.505.

³ Syamsuddin al-Sarkasyi, *loc.cit*.h. 27.

berpendapat wakaf berposisi sama seperti *al-‘ariyah*⁴. Sebagaimana kutipan perkataannya dalam kitab Fathul Qodir,

عند أبي حنيفة : حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية⁵

Artinya: ”Menurut Imam Abu Hanifah: menahan wujud benda (yang diwakafkan) masih milik wāqif dan menyedekahkan manfaatnya seperti layaknya pinjam-meminjam”.

Wakaf yang diposisikan oleh Imam Abu Hanifah seperti *al-‘Ariyah* hukumnya adalah dibolehkan, bukan sebuah kelaziman (kemestian/ kewajiban yang mengandung hukum mengikat), seperti halnya wasiat atau warisan, akan tetapi ia akan menjadi wajib (tidak bisa ditarik kembali) apabila⁶:

1. Wakaf tersebut diputuskan oleh hakim al-Muwalla (hakim yang diberikan wewenang menangani urusan umat), bukan hakim al-Muhakkam (hakim yang menengahi persengketaan). Seperti apabila terjadi perselisihan antara wakif (orang yang berwakaf) dengan nazhir wakaf (pengawas wakaf) yang terjadi akibat dari keinginan wakif untuk mencabut kembali harta wakaf dengan alasan wakaf tidak bersifat lazim, kemudian hakim al-Muwalla memutuskan kelaziman wakaf tersebut. maka wakaf tersebut tidak dapat ditarik kembali.

⁴ Al-‘Ariyah adalah memberikan kepemilikan terhadap manfaat benda (benda tersebut dapat diambil manfaatnya) kepada orang lain, akan tetapi benda tersebut dikembalikan lagi. Lihat Syamsuddin al-Sarkasyi, *op.cit.* juz , h. 27.

⁵ Sebagaimana dikutip dalam Ibnu Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, (Beirut, Darul Kutub, t.t.), h. 37.

⁶ Waahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke-1, 269-270.

2. Wakif (orang yang berwakaf) mengaitkan harta wakaf dengan kematiannya. Seperti ia berkata: “jika saya mati, saya akan mewakafkan rumah saya untuk...(misalnya untuk mesjid dan lain-lain)”, maka wakaf seperti ini ditunaikan (tidak bisa ditarik lagi). Akan tetapi jumlahnya hanya seperti washiat yakni sepertiga.
3. Wakif menjadikan harta wakaf tersebut untuk wakaf masjid. Dan ia telah memisahkan kepemilikannya dengan hartanya yang lain.

B. Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Kebolehan Penarikan Kembali Harta Wakaf

1. Pengertian Istinbath Hukum

Istinbath Hukum (استنباط الأحكام) adalah kata majemuk yang tersusun dari kata “*Istinbath*” dan “*al-Hukm*”, kedua kata tersebut berasal dari bahasa arab. Kata *Istinbath* adalah mashdar dari tashrif - يستنبط - استنبط secara etimologi adalah mengeluarkan, menimbulkan atau melahirkan⁷. Sedangkan menurut terminologi ushul fiqih adalah mengeluarkan makna – makna dari *nash – nash* dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah.⁸

Sedangkan kata *al-Hukm* secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Kata hukum dan kata lain yang berakar pada kata itu terdapat dalam 88 tempat pada ayat al-Qur’an, tersebar

⁷ S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia, Al-Azhar, Terlengkap Mudah dan Prkatis*, (Jakarta: Senayan Publising, 2009), cet ke -1, h. 884.

⁸ Totok Jumanoro dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, AMZAH,(tt:tp,2005), cet ke-1, h.142.

dalam beberapa surat yang mengandung arti tersebut. kata hukum itu sudah menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Dalam arti sederhana dikatakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu Negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya, akan tetapi secara khusus dalam hal ini menyangkut dengan syariat. Maka hukum didefenisikan dengan seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁹

Jadi dapat didefenisikan bahwa Istimbath Hukum adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk mencari hukum syara' yang bersifat zhanni.¹⁰

Berdasarkan pengertian *istinbath* secara istilah, metode yang ditempuh oleh Abu Hanifah dalam ber-*istinbath* adalah terlihat dari ungkapan beliau sendiri sebagai berikut: *“Sesungguhnya aku mencari hukum di dalam Kitabullah, bila tidak aku dapati aku mencarinya dalam hadis yang sahih yang berasal dari perawi – perawi yang tsiqaat. Kalau aku tidak memperolehnya, aku berpegang kepada perkataan sahabat, siapa saja di antaranya yang aku pilih, dan bila belum kudapati juga,*

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet ke-4, h. 333.

¹⁰ @lvee el-Ishdar “Sistematika Sumber Hukum Islam dan Sistem Istimbath Imam-Imam Mazhab” Artikel diakses pada 03 Agustus 2012, jam 08.37 dari @lvee el-Ishdar: sistematika-sumber-hukum-islam-dan.html.

*meskipun telah sampai kajianku pada perkataan Ibrahim Nakh'iy, Sya'by, Ibnu Sirin, Hasan, 'Atha', Sa'id bin Musayyab dan beberapa yang lain, maka aku akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad"*¹¹.

Berdasarkan ungkapan Imam Abu Hanifah di atas, dalam mengistinbatkan suatu hukum ia terlebih dahulu merujuk kepada Al-Quran, jika tidak ditemukan, beliau kembali kepada Hadis, dan ketika dalam Hadis tidak terjawab pula, dalam hal ini beliau melihat perkataan sahabat yang kemudian diambil pendapat mereka yang sejalan dengan pikiran beliau dan ditinggalkan mana yang tidak sesuai. Apabila semua sahabat sependapat dalam menetapkan suatu hukum, ia akan mengikuti pendapat itu sepenuhnya.

2. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikan nya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl aw-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum islam, baik yang di *istinbath* kan dari al-Quran atau pun Hadits, beliau banyak menggunakan nalar¹².

¹¹ Zulkayandri, *Fiqh Muqaran (Merajut 'Ara' al-Fuqaha' dalam Kjian Fiqih perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer)*, (Riau: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2008), cet ke-1, h. 54.

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 97-98.

Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalah* nya secara qath'iy dari al-Quran atau hadis yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan *ra'yu*. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari madinah sebagai kota tempat tinggal Rosulullah SAW.¹³

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Abu Hanifah di atas, bahwa ia akan berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang Qath'iy (tetap dan jelas hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadits), atau masih bersifat Zhanny dengan menggunakan beberapa cara atau metode. Adapun metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum adalah dengan berpedoman pada:¹⁴

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushf berbahsa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Moenawar chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), cet ke-9, h. 79. Lihat juga Zulkayandri, *op.cit.*, h.55.

membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.¹⁵

Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an ada tiga macam, yaitu:¹⁶

1. Hukum-hukum *I'tiqadiyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan iman kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab Allah, kepada para Rasulullah dan kepada hari akhir.
2. Hukum-hukum *Khuliqiyyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.
3. Hukum-hukum *'Amaliyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik mengenai ibadah maupun muamalah.

b. Al-Sunnah

Kata سنة berasal dari kata سن - يسن - سنة . secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan , apakah cara adalah sesuatu yang baik, atau yang buruk. Penggunaan kata sunnah dalam arti ini terlihat dalam sabda nabi Muhammad SAW "... siapa yang membuat sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Dan siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka

¹⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh-Penggalan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet ke-7, h. 62.

¹⁶ *Ibid.*

baginya dosa (siksaan) dan dosa orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat...”

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.¹⁷

Perbedaan ahli ushul dan ahli fiqh dalam memberikan arti pada sunnah sebagaimana disebutkan di atas adalah karena mereka berbeda dalam segi peninjauannya. Ulama ushul menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum fiqh, untuk itu sering ulama ushul mengatakan “hukum itu ditetapkan berdasarkan sunnah”. Sedangkan ulama fiqh menempatkan sunnah sebagai salah satu dari hukum syara’ dari hukum syara’ yang lima yang mungkin berlaku terhadap suatu perbuatan. Karena itu ulama fiqh sering mengatakan “perbuatan ini hukumnya adalah sunnah”.¹⁸

¹⁷ Amir Syraifuddin, *op.cit*, h. 86-87.

¹⁸ *Ibid.* h. 87-88.

Dari pandangan ulama ushul diatas, sunnah dapat dibagi menjadi 3, yaitu:¹⁹

1. Sunnah Quliyyah

Sunnah Qauliyyah adalah ucapan nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukil oleh sahabatnya, namun yang diucapkan nabi itu bukan wahyu al-Qur'an. Al-Quran juga lahir dari lisan nabi yang juga disengar oleh sahabat dan disiarkannya kepada orang lain, sehingga kemudian diketahui orang banyak.

Dilihat dari lahirnya al-Qur'an dan sunnah adalah sama-sama muncul dari lisan nabi, namun para sahabat kemudian diminta nabi untuk membedakan antara wahyu al-Qur'an dan sunnah, seperti nabi menyuruh para sahabat untuk menghafal dan menuliskannya apabila yang disampaikan adalah al-Qur'an, atau dinukilkan secara *mutawatir* sedangkan sunnah bisa saja didengar oleh satu orang saja, dan dilarang oleh nabi untuk menulisnya karena adanya kekhawatiran bercampur dengan al-Qur'an.

2. Sunnah Fi'liyyah

Sunnah Fi'liyyah adalah semua perbuatan dan tingkah laku nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diperhatikan oleh para sahabat, kemudian disampaikan dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya.

¹⁹ *Ibid.*, h. 89-95.

3. Sunnah Taqririyah

Sunnah Taqririyah adalah perbuatan atau perkataan seseorang sahabat yang dilakukan dihadapan atau sepengetahuan nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah nabi. Diamnya nabi disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada sahabat yang lain dengan ucapannya sendiri.

c. Fatwa-Fatwa (aqwal) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in tercover atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh dari *talaqqy* dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda nabi, khawatir salah berarti berdusta atas nabi.²⁰

Perlu ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab madzhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan (aqwal), yakni qaul Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Zafar bin Hudzail²¹, karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya.

²⁰ Zulkayandri, *op.cit.*, h. 61.

²¹ Munawar Chalil, *loc.cit.*

d. Qiyas

Secara etimologi, kata qiyas berarti **قَدَر**, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan tentang arti Qiyas menurut terminology terdapat beberapa definisi berbeda yang saling bersekatan maknanya. Salah satunya adalah pendapat Abu Zahrah yakni:

الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر اخر منصوص على حكمه لاشتراكها في علة الحكم.

Artinya: “Menghubungkan (menyamakan) hukum perkara yang tidak ada ketentuan nash-nya dengan hukum perkara yang sudah ada ketentuan nash-nya berdasarkan persamaan ‘illat hukum keduanya.”²²

Dari definisi diatas, maka para ulama ushul menetapkan rukun Qiyas yang terdiri dari 4 macam, yaitu:²³

1. Ashal, yaitu sesuatu yang di-nash-kan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan. Ashal ini harus berupa ayat al-Qur’an atau sunnah, serta mengandung ‘illat hukum.
2. Far’u, yaitu cabang atau sesuatu yang tidak di-nash-kan hukumnya yaitu yang diqiyaskan, yang disyaratkan tidak memiliki hukum sendiri, memiliki ‘illat hukum sama dengan ‘illat hukum yang ada

²² Amir syarifuddin, *op.cit.*, h. 173. Lihat juga Zulkayandri, *loc.cit.*, h. 61.

²³ A. Djazuli, *op.cit.*, h. 77.

pada ashal, tidak lebih dahulu dari ashal, dan memiliki hukum yang sama dengan ashal.

3. Hukum ashal, yaitu hukum syara' yang di-nashkan pada ashal kemudian menjadi hukum pula pada far'u (cabang). Yang disyaratkan bersifat hukum amaliyyah, pensyariatannya rasional (dapat difahami), bukan hukum yang khusus (seperti khusus untuk nabi), dan hukum ashal masih berlaku.
4. 'illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya hukum. 'illat hukum disyaratkan dapat diketahui dengan jelas adanya 'illat, dapat dipastikan terdapatnya illat tersebut pada far'u, illat merupakan penerapan hukum untuk mendapat maqashid al-syar'iyyah dan illat tidak berlawanan dengan nash.

e. Istihsan

Dari segi bahasa kata istihsan adalah bentuk mashdar dari kata **استحسن- يستحسن- استحسانا** artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.²⁴

Sedangkan menurut istilah syara' adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa,

²⁴ Safiudin Shidik, *Ushul Fiqh*, (ttt: Intimedia,tt), h. 59.

karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu.²⁵

f. Ijma'

Secara bahasa kata Ijma' berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk mashdar dari kata **اجمع – يجمع - اجماعا**, secara bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya: Pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu; kedua, sepakat.²⁶

Sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amaly*).²⁷ Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa Ijma' dapat dijadikan argumentasi (Hujjah) untuk menetapkan hukum Syara'.

g. 'Urf (Adat yang berlaku di dalam masyarakat umat islam)

Dilihat dari segi bahasa kata 'Urf berasal dari bahasa arab, mashdar dari kata **عرف – يعرف – عرفا**, sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. contohnya dalam kalimat **احمد اولى من فلان عرفا** artinya: “Ahmad lebih dikenal dari yang lainnya”²⁸

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Ma'shum, slamet bayir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan rasyid, Ali Zawawi Fuad falahuddin, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet ke-11, h. 401.

²⁶ Safiudin Shidik, *op.cit.*, h. 39.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 308.

²⁸ Safiudin Shidik, *op.cit.*, h. 72.

Sedangkan menurut istilah syara' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.²⁹ Para ulama sepakat apabila 'urf bertolak belakang atau bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, maka 'urf tersebut tertolah (tidak bisa diterima).

3. Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menarik Kembali Harta Wakaf

Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan muridnya Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan tentang kebolehan menarik kembali harta wakaf. Kedua muridnya (Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan) berpendapat tidak membolehkan, karena perbedaan pemaknaan dari wakaf itu sendiri, sehingga wakaf tersebut tidak dapat ditarik kembali dan kepemilikan terhadap harta wakaf menjadi hilang. Maka dengan hilangnya kepemilikan terhadap harta wakaf maka tidak dapat lagi diwariskan setelah orang yang berwakaf meninggal dunia.³⁰

Menurut jumhur ulama, harta atau benda yang diwakafkan tidak menjadi milik sempurna orang yang berwakaf lagi. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, meskipun asal harta tersebut masih berada dalam kuasa orang yang berwakaf, akan tetapi hasilnya telah didistribusikan.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Al-Syarkasi, *op.cit.*, h.28.

Oleh sebab itu. Imam Abu Hanifah memandang penarikan harta wakaf oleh orang yang berwakaf dibolehkan.

Adapun alasan/ argumen ia membolehkan adalah:

1. Terdapatnya sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthny dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

حد ثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله حد ثنا محمد بن عبد الرحيم بن موسى الصدفي بمصرى حد ثنا عمرو بن خالد، حد ثنا ابن لهيعة ، عن اخيه عيسى بن لهيعة ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس عن فرائض الله عز و جل (رواه الدار قطنى)

Artinya: “ ‘Ubaidullah bin ‘Abdisshomad bin al-Muhtadi Billah bercerita, dari Muhammad bin Abdirrahim bin Musa al-Shad, dari ‘Amru bin Khalid, Ibnu Luhai’ah bercita dari saudaranya ‘Isa bin Luhai’ah dari ‘ikrimah dari Ibn Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: Tidak ada yang bisa menahan (mewakafkan) dari apa yang diwajibkan (warisan) Allah”³¹.

Hadits diatas menjadi dalil menurut Imam Abu Hanifah, tentang kebolehan menarik kembali harta wakaf. Karena apabila harta wakaf tersebut tidak ditarik kembali-harta wakaf tersebut dikeluarkan dari harta orang yang mewakafkan yang kelak setelah ia meninggal dunia, harta tersebut menjadi harta warisan-ini merupakan penghalang ketentuan-ketentua Allah, yakni menghalangi ahli waris dari untuk memperoleh

³¹ Ali bin Umar al-Daruquthny, *Sunana al-Daruquthny*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), jilid 2, h. 23.

bagian mereka dari harta warisan yang telah Allah tentukan bagian mereka, meskipun pada saat pendistribusian wakaf, hukum warisan belum berlaku.

2. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abu Hurairah,

حدثنا يحيى بن ايوب و قتيبة - يعنى ابن سعيد - و ابن حجر قالو: حدثنا اسما عيل - وهو ابن

جعفر - عن العلاء ، عن ابيه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: اذا مات

الا نسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث: الا من صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح

يدعو له

Artinya: “Yahya bin Ayyub, Qutaibah—maksudnya Ibnu Sa’id—dan Ibnu Hajr mereka berkata: Ismail bercerita kepada kami —dia adalah Ibnu Ja’far—dari al-‘Alla’ dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila manusia meninggal maka putuslah amalannya (dia tidak dapat beribadah lagi) kecuali dari tiga macam: Seedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakannya”.

Menurut Imam Abu Hanifah, hadits diatas juga menjadi sebuah dalil kebolehan menarik kembali harta wakaf, karena seseorang yang berwakaf menahan asal harta dan mendistribusikan manfaatnya, dan manfaat yang berkesinambungan/berterus-terusanlah sebenarnya yang dapat menyambung atau menambah amalan orang yang meninggal.

Penarikan harta wakaf yang dilakukan oleh orang yang berwakaf menurut Imam Abu Hanifah diistinbathkan berdasarkan *istihsan* yakni dengan memberi ganti yang lebih baik, karena manfaat itu tidak akan dapat terwujud kecuali dengan menggantinya apabila

telah rusak atau tidak dapat memberi manfaat lagi. Penarikan harta wakaf tersebut dimaksudkan untuk mengganti dengan yang lebih baik. Karena hal tersebut merupakan peningkatan iman dengan menyedekahkan harta yang paling dicintai dan yang lebih baik. sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”³².

C. Analisa Terhadap Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf

Menurut Imam Abu Hanifah wakaf merupakan salah satu bentuk kedermawanan yang tidak mempunyai konsekuensi pasti dan boleh dicabut/ditarik kembali, berposisi sebagai *al-‘Ariyyah* yang tidak menjadi sebuah keharusan (lazim). Transaksi tersebut akan gugur apabila ia mati, dan harta wakaf tersebut bisa diwariskan sebagaimana ditetapkan dalam hukum *al-‘Ariyyah*.³³

³² Lembaga Penerjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 91.

³³ Al-Syarkasi, *op.cit.*, h.28.

Adapun dasar pendapat imam Abu Hanifah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthny dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

لا حبس عن فرا نض الله

Artinya: “Tidak ada yang bisa menahan dari apa yang diwajibkan (warisan) Allah”.

Setelah dilakukan takhrij oleh beberapa ulama diantaranya adalah Wahbah al-Zuhaili, bahwa hadits tersebut adalah dha’if (lemah). Dan maksud dari hadits tersebut bukanlah untuk wakaf, akan tetapi menolak atau membatalkan pendapat atau adat jahiliyah yang menetapkan bahwa ahli waris hanyalah laki-laki dewasa saja, tidak termasuk perempuan dan anak kecil.³⁴ Sedangkan dalam islam baik laki-laki maupun perempuan dan dewasa maupun anak-anak adalah sama memperoleh harta warisan.

Imam Abu Hanifah memahami bahwa mewakafkan harta dapat menghalangi ahli waris mendapat bagian yang telah ditentukan oleh Allah. ketika harta tersebut diwakafkan, maka dengan otomatis harta tersebut akan berkurang dari jumlah semula, yang juga akan memastikan para ahli waris akan kehilangan hak mereka yang sudah ditentukan oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ [4]: 7

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, *op.cit.* juz 10, h. 75-99.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧٦﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Ayat al-Qur'an yang dijadikan Imam Abu Hnifah dan Ulama lainnya sebagai dasar hukum wakaf seperti surat ali Imran ayat 92, menurut Wahbah al-Zuhaili memiliki dua tujuan yakni:³⁵

1. Bahwa infak/ wakaf yang diperuntukkan di jalan Allah (fi sabilillah) adalah untuk menyampaikan kepada hakikat birr (kebaikan sebenarnya) diambil dari harta yang paling dicintai, ukuran baik tersebutlah yang menjadi tolak ukur pahalanya (semakin baik yang diinfakkan, maka semakin baik pula balasannya/ pahalanya).
2. Anjuran untuk merahasiakan sedekah, menjauhkan dari sifat riya, dan ikhlas dalam beramal karena Allah dan menghindarkan hati seorang yang beriman lagi shaleh dalam beramal karena Allah dan menghindarkan hati seorang yang beriman lagi shaleh dari tipudaya syaithan.

Harta yang sudah diwakafkan, ketika ditarik kembali oleh orang yang mewakafkan memiliki konsekuensi bahwa orang yang berwakaf tidak

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munirfi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), cet ke-9, jilid 2, h. 321.

mewakafkan hartanya karena Allah, karena pada dasarnya sesuatu yang telah diserahkan (wakaf) karena Allah, telah berkonsekuensi hilangnya kepemilikannya terhadap harta tersebut, inilah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad (murid Abu Hanifah), Imam Muhammad Idris al-Syafi'i (Imam Syafi'i), Imam Malik.

Menurut madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali³⁶ Wakaf yang telah sah (sudah mencakup rukun dan syarat) memiliki hukum mengikat, maksudnya tidak bisa ditarik lagi atau dibatalkan. Dan kepemilikan wakif terhadap harta wakaf menjadi hilang. Hal ini didasarkan pada hadits nabi:

حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اصاب عمر بخير ارضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصببت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: ان شئت ست أصلها و يصدق بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها لا يوهب ولا يورث في الفقراء والقريب والرقاب وفي سبيل الله و الضيف و ابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

Artinya: “Musaddad bercerita kepada kami dari Yazid bin Zurai’, dari Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar RA ia berkata: bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah rampasan pada perang khaibar, lalu ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: aku belum pernah aku peroleh tanah sebagus ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku?, Rasulullah SAW bersabda: jika engkau mau, engkau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu, dan menyedekahkan hasil dari tanah itu. Maka Umar menyedekahkan hasil dari tanah tersebut, dengan syarat bahwa tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak belian, tamu dan musafir, orang yang mengawasi tanah tersebut dibolehkan

³⁶ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifat al-Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, tt), juz 3, h. 522.

memakan hasil dari tanah tersebut dengan baik, memberi makan orang lain dari hasil itu tanpa menyimpannya (kikir)”³⁷.

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menarik kembali harta wakaf dengan alasan hadits nabi yang mengatakan “tidak seorangpun yang berhak menahan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah (warisan)”. Maka setelah melakukan penelitian, menurut penulis pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menarik kembali harta wakaf sangat lemah sekali, dengan pertimbangan dan pengkajian yang dilakukan oleh para ulama, yakni:

1. Bahwa setelah dirujuk, hadits tersebut diriwayatkan oleh Daruquthny, terdapat dalam pembahasan warisan. Hadits tersebut merupakan bantahan ataupun penolakan terhadap adat/tradisi jahiliyah karena membatasi ahli waris hanya pada laki laki dewasa saja. Sedangkan ketentuan Allah (syariat Islam) termasuk dalam kategori ahli waris adalah laki-laki maupun perempuan baik yang masih kecil ataupun sudah dewasa.
2. Bahwa warisan berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia, karena rukun waris adalah nyata meninggal orang yang mewarisi, nyata hidup orang yang diwarisi, dan ada harta waris, sedangkan wakaf dilaksanakan ketika orang yang berwakaf masih hidup, dan harta yang akan ia wakafkan adalah harta miliknya secara sempurna, yang bebas ia distribusikan sekehendaknya selama tidak bertentangan dengan syariat, termasuk mewakafkan hartanya yang menurut jumhur ulama berkonsekuensi

³⁷ Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Atsqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhori*, (Beirut: Dar Kutb al-Ilmiyyah), Juz 5, h. 501.

hilangnya kepemilikan terhadap harta tersebut dan pemberian pemilikan kepada Allah SWT karena keuntungannya harus digunakan demi kesejahteraan manusia dari awal sampai akhir.

3. Sedangkan Hadits “jika kamu menginginkan, engkau dapat menahan asal harta, dan engkau sedekahkan hasilnya ”, menurut riwayat yang shahih dari Ibnu Umar: penahanan asal harta disyaratkan untuk tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwarisi, yang memberi pengertian bahwa harta wakaf tersebut bukan lagi milik sempurna orang yang berwakaf, sehingga ia tidak bisa menjual, dihibahkan/dihadiahkan maupun di warisi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah suatu gambaran/ungkapan tentang menahan sesuatu yang dimiliki tidak dapat pula dimiliki orang lain. Pengertian ini memberi penjelasan bahwa Imam Abu Hanifah tidak semata-mata melepaskan harta tersebut secara putus. Kebolehan berwakaf pada dasarnya, dia berpendapat bahwa orang yang berwakaf menahan benda wakaf tersebut, akan tetapi manfaatnya didistribusikan. Oleh karena itu ia berpendapat wakaf berposisi sama seperti *al-‘ariyah* (pinjam-meminjam).
2. Dalam mengistinbahkan hukum menarik kembali harta wakaf, Imam Abu Hanifah menggunakan hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthny dari Ibnu Abbas yakni:

لا حبس عن فرا ئض الله

Artinya: “tidak ada yang bisa menahan (mewakafkan) sesuatu yang telah ditetapkan Allah (warisan)”

3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk kedermawanan yang tidak mempunyai konsekuensi pasti dan

boleh dicabut/ditarik kembali, berposisi sebagai *al-‘Ariyyah* yang tidak menjadi sebuah keharusan (lazim). Transaksi tersebut akan gugur apabila ia mati, dan harta wakaf tersebut bisa diwariskan sebagaimana ditetapkan dalam hukum *al-‘Ariyyah*. Pendapatnya berbeda dengan jumhur ulama yang berpendapat bahwa harta wakaf tidak lagi dimiliki oleh siapapun kecuali Allah dan harta wakaf itu tidak bisa ditarik kembali.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan menyangkut penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahwa mengamalkan pendapat jumhur ulama lebih baik yakni tidak dapat menarik harta wakaf kembali, jadi apabila seseorang mewakafkan hartanya, hendaklah ia meminta izin dahulu kepada ahli warisnya, agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari.
2. Bagi calon wakif, hendaklah menilai dan menimbang-nimbang kemantapan hati untuk berwakaf dan ikhlas hanya mengharap ridha Allah dan balasan *khairu Jaza'* (balasan terbaik), agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, serta mewakafkan harta yang bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Farid Syaikh, *Min A'lam As Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman Judul 60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2007, Cet ke 2
- Al-Daruquthny, Ali bin Umar, *Sunana al-Daruquthny*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, jilid 2
- Al-'Atsqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhori*, Beirut: Dar Kutb al-Ilmiyyah, Juz 5
- Al-Zuhaili Wahbah, *al-Tafsir al-Munirfi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 2007, cet ke-9, jilid 2
- Al-Dardiriy Muhammad ibn Ahmad ibn, *Syarh al-Shagir 'ala Mukhtar Aqrab al-Masalik li Mazhab Imam Malik*, Mesir: Dar al-Tahrir wa al-Nasyr, 1968
- Al-Faifi Sulaiman, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo: Aqwaam, Serikat Penerbit Islam, 2010, Cet. Ke- 1, Jilid 2
- As-Sarkhasi Syamsuddin, *Kitab Al-Mabsuth*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiyah, 490 H
- Al-Zuhaili Waahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke-1
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil judul Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001, Cet 3
- Agama RI Departemen, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007
- Agama RI Departemen, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007
- Al-Bani Nashiruddin, (Pent. Elly Latifah), *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Amin Suma Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Bastoni Hepi Andi, *101 Kisah Tabi'in*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, Cet 1

- Chalil Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hambaly*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955, Cet ke 9
- Djatnika Rahmad, Syarifuddin Amir dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama/ IAIN di Jakarta Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI, 1986
- Fauzan dan Suwito, *Sejarah Pemikiran para Tokoh Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 2003
- Haq, Faisal, Anam, Saiful, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, Pasuruan: Jawa Timur, 1993, cet. Ke-1
- Hasbi As-Soddiqy T. Muhammad, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952), cet ke-1
- http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian_Wakaf. diposting tgl 23 Oktober 2007, diakses tgl 25 Agustus 2011.
- Ibrahim Ibnu, Ismail Ibnu Muhammad, 'Abdillah Abi, Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Al-Qahirah: Dar Ibnu Al-Haitsim, 1425
- Imam Abi Al-Husein Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971
- Jawad Mugniyah Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004
- Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993, Cet. Ke-1
- Lembaga Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Muhammad Syamsuddin bin al-Khatib al-Syarbiny Muhammad, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifat al-Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt, juz 3
- Mubarak Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya th
- Munawwir Warson Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984

- Rahman Asymuni A. dkk, Dahwan, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, 23 Jan 1986, Cet. Ke-2
- Roestan dkk, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*, Jakarta; CV. Kalam Mulia, 1992, Cet. Ke-1
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989
- Sebagaimana dikutip dalam Ibnu Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Bairut, Darul Kutub, t.t.
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-Dasar Metode Teknik)*, Tarsito, Bandung, 1990
- Shomad, Abd, *HukumIslam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana 2010
- Tahido Yanggo Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, cet. Ke-1
- Thalib M, *Fiqh Nabawi*, (Surabaya Indonesia), h. 204-205
- Undang-undang Republik Indonesia no 41 tentang wakaf dan kompilasi hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan di bIndonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. Pertama
- Yunus Mahmud, *Kamus arab-Indonesia*, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1989
- Zein Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004